

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

Permenpan 2012 - Tata Naskah
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut. 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun ...
2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH. Pasal 1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 3 - Agar ...

Bincang Bahasa: Bahasa Indonesia dalam Naskah Dinas*Biodiversitas Nusantara Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan_Modul 2: Strategi dan Struktur_Dr. Ambar W. Diskusi Kontribusi PCR kepada Masyarakat: Mengenal Aplikasi Lacak Covid-19 Pekanbaru (Cik Puan) EKP 2020.09.17 - Kolaborasi universitas dan desa lewat Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Menghasilkan karya ilmiah bereputasi bersama Rima Pratiwi Fadli, M.Pd Webinar Perkim #4 \RP3KP, Perda atau Perkada? Webinar PPIJ #4 \Membukukan karya tulis Ilmiah dan Membukukan Karya Siswa\, 2 Mei 2020 Implementasi Literasi Digital di Masa Pandemi*

Zoominar Strategi Menghadapi Era New Normal Berbasis MasyarakatSeminar Online Fapet UB : Penulisan Buku Ajar Bagi Pemula dan Best Seller Seminar Online Hasil Kuliah Kerja Profesi Ilmu Komunikasi (Sesi 2) **Belajar OJS series 14 dengan tema "**Bedah Jurnal Sesuai Standar Akreditasi Jurnal**(ARJUNA)" Strategi Penguatan Literasi Informasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan**
Akreditasi Snars 1.1 dalam Peningkatan Mutu Pelayanan KesehatanVirtual Sharing Series #5 Menulis dan Meneliti : Menebar Wawasan dengan Tinta dan Media [Webinar] Bimtek Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat WEBINAR PENDIDIKAN | Peran Guru Dalam Mengembangkan Pembelajaran Jarak Jauh Menyikapi New Normal #1 *Workshop Cara Menulis Artikel di Media Massa - Webianr Zoom FT Unimus KOMPAK (Komunikasi dan Media Pembinaan Analis Kebijakan) Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi*
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut. www.djpp.depkumham.go.id. 9 2013, No.69 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

(PDF) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH ...

Permenpan 2012 - Tata Naskah

(PDF) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH ...

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut. 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan BPKP, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, seragam, serta terpadu dengan instansi pemerintah lainnya . Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah sebagai berikut: 1. Asas Efektif dan Efisien . Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan ...

tata naskah dinas: Pedoman Tata Naskah Dinas

pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia tahun 2012 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH - 123dok

TujuanPedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuanmenciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalampenyelenggaraan pemerintahan.C. SasaranSasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintahadalah:1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalampenyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh instansi pemerintah;2. terwujudnya keterpaduan ...

Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH ...

tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor 72/M.PAN/07/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas menilai bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS - BPKP

2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH. Pasal 1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 3 - Agar ...

PERATURAN MENTERI DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK ...

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Naskah Dinas di Lembaga Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik ...

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS - BSSN

PEDOMAN UMUM. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIS . DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH . Pendahuluan; Kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan modernisasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. ...

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIS DILINGKUNGAN ...

Peraturan Instansi Lain TAG PERATURAN . administrasi. ahli kepubeanan. ak-fta ... Organisasi dan Tata Laksana: Mulai Berlaku: 27-Aug-2010 s/d : Tentang: Pedomana Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan: Isi Singkat: bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antarunit organisasi, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan tata ...

Organisasi dan Tata Laksana - Pedomana Tata Naskah Dinas ...

Tujuan Pedoman Umum TNDE ini bertujuan untuk menciptakan acuan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis TNDE instansi pemerintah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.C. Sasaran Sasaran TNDE adalah 1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di seluruh instansi pemerintah; 2. terwujudnya ...

Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ...

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sedangkan administrasi tata persuratan, tata kearsipan, dan tata pelaporan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 ...

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 ...

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN ...

Tujuan disusunnya pedoman tata naskah dinas adalah untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau dengan instansi/pihak lain di luar Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dasar Hukum tata naskah dinas di Kementerian Keuangan: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 80 ...

TATA NASKAH DINAS - kicfiles.kemenkeu.go.id

Dengan melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas, diharapkan tercipta tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas komunikasi tulis antar instansi pemerintah dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Jakarta, Mei 2011 Sekretaris Utama, DR. Sudibyo Alimoeso, MA - 1 - PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Peraturan Menteri (Permen) Keputusan Menteri (Kepmen) ... Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2016 "Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat" Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2016 Tentang Pedoman TND ; Permen PU Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Dep.PU ...

Bincang Bahasa: Bahasa Indonesia dalam Naskah Dinas*Biodiversitas Nusantara Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan_Modul 2: Strategi dan Struktur_Dr. Ambar W. Diskusi Kontribusi PCR kepada Masyarakat: Mengenal Aplikasi Lacak Covid-19 Pekanbaru (Cik Puan) EKP 2020.09.17 - Kolaborasi universitas dan desa lewat Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Menghasilkan karya ilmiah bereputasi bersama Rima Pratiwi Fadli, M.Pd Webinar Perkim #4 \RP3KP, Perda atau Perkada? Webinar PPIJ #4 \Membukukan karya tulis Ilmiah dan Membukukan Karya Siswa\, 2 Mei 2020 Implementasi Literasi Digital di Masa Pandemi*

Zoominar Strategi Menghadapi Era New Normal Berbasis MasyarakatSeminar Online Fapet UB : Penulisan Buku Ajar Bagi Pemula dan Best Seller Seminar Online Hasil Kuliah Kerja Profesi Ilmu Komunikasi (Sesi 2) Belajar OJS series 14 dengan tema "Bedah Jurnal Sesuai Standar Akreditasi Jurnal**(ARJUNA)" Strategi Penguatan Literasi Informasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan**
Akreditasi Snars 1.1 dalam Peningkatan Mutu Pelayanan KesehatanVirtual Sharing Series #5 Menulis dan Meneliti : Menebar Wawasan dengan Tinta dan Media [Webinar] Bimtek Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat WEBINAR PENDIDIKAN | Peran Guru Dalam Mengembangkan Pembelajaran Jarak Jauh Menyikapi New Normal #1 *Workshop Cara Menulis Artikel di Media Massa - Webianr Zoom FT Unimus KOMPAK (Komunikasi dan Media Pembinaan Analis Kebijakan) Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi*
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut. www.djpp.depkumham.go.id. 9 2013, No.69 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

(PDF) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH ...

Permenpan 2012 - Tata Naskah

(PDF) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH ...

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut. 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan BPKP, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, seragam, serta terpadu dengan instansi pemerintah lainnya . Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah sebagai berikut: 1. Asas Efektif dan Efisien . Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan ...

tata naskah dinas: Pedoman Tata Naskah Dinas

pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia tahun 2012 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH - 123dok

TujuanPedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuanmenciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalampenyelenggaraan pemerintahan.C. SasaranSasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintahadalah:1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalampenyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh instansi pemerintah;2. terwujudnya keterpaduan ...

Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH ...

tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor 72/M.PAN/07/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas menilai bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS - BPKP

2012 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH. Pasal 1 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 3 - Agar ...

PERATURAN MENTERI DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK ...

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Naskah Dinas di Lembaga Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik ...

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS - BSSN

PEDOMAN UMUM. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIS . DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH . Pendahuluan; Kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan modernisasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. ...

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIS DILINGKUNGAN ...

Peraturan Instansi Lain TAG PERATURAN . administrasi. ahli kepabeanan. ak-fita ... Organisasi dan Tata Laksana: Mulai Berlaku: 27-Aug-2010 s/d : Tentang: Pedomana Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan: Isi Singkat: bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antarunit organisasi, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan tata ...

Organisasi dan Tata Laksana - Pedomana Tata Naskah Dinas ...

Tujuan Pedoman Umum TNDE ini bertujuan untuk menciptakan acuan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis TNDE instansi pemerintah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.C. Sasaran Sasaran TNDE adalah 1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di seluruh instansi pemerintah; 2. terwujudnya ...

Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ...

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sedangkan administrasi tata persuratan, tata kearsipan, dan tata pelaporan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 ...

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 ...

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN ...

Tujuan disusunnya pedoman tata naskah dinas adalah untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau dengan instansi/pihak lain di luar Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dasar Hukum tata naskah dinas di Kementerian Keuangan: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 80 ...

TATA NASKAH DINAS - klcfiles.kemenkeu.go.id

Dengan melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas, diharapkan tercipta tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas komunikasi tulis antar instansi pemerintah dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Jakarta, Mei 2011 Sekretaris Utama, DR. Sudibyo Alimoeso, MA - 1 - PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Peraturan Menteri (Permen) Keputusan Menteri (Kepmen) ... Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2016 "Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat" Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2016 Tentang Pedoman TND ; Permen PU Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Dep.PU ...

Organisasi dan Tata Laksana - Pedomana Tata Naskah Dinas ...

Bincang Bahasa: Bahasa Indonesia dalam Naskah DinasBiodiversitas Nusanantara Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan_Modul 2: Strategi dan Struktur_Dr. Ambar W. Diskusi Kontribusi PCR kepada Masyarakat: Mengenal Aplikasi Lacak Covid-19 Pekanbaru (Cik Puan) FKP 2020 09 17 - Kolaborasi universitas dan desa lewat Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Menghasilkan karya ilmiah bereputasi bersama Rima Pratiwi Fadli, M.Pd Webinar Perkim #4 "RP3KP: Perda atau Perkada? Webinar PPIJ #4" "Membukukan karya tulis ilmiah dan Membukukan Karya Siswa", 2 Mei 2020 Implementasi Literasi Digital di Masa Pandemi

Zoominar Strategi Menghadapi Era New Normal Berbasis MasyarakatSeminar Online Fapet UB : Penulisan Buku Ajar Bagi Pemula dan Best Seller Seminar Online Hasil Kuliah Kerja Profesi Ilmu Komunikasi {Sesi 2} Belajar OJS series 14 dengan tema " Bedah Jurnal Sesuai Standar Akreditasi Jurnal(ARJUNA)" Strategi Penguatan Literasi Informasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Akreditasi Snars 1.1 dalam Peningkatan Mutu Pelayanan KesehatanVirtual Sharing Series #5 Menulis dan Meneliti : Menebar Wawasan dengan Tinta dan Media [Webinar] Bimtek Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat WEBINAR PENDIDIKAN | Peran Guru Dalam Mengembangkan Pembelajaran Jarak Jauh Menyikapi New Normal #1 Workshop Cara Menulis Artikel di Media Massa - Webianr Zoom FT Unimus KOMPAK (Komunikasi dan Media Pembinaan Analis Kebijakan) Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN ...

Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan BPKP, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, seragam, serta terpadu dengan instansi pemerintah lainnya . Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas adalah sebagai berikut: 1. Asas Efektif dan Efisien . Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan ... Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Naskah Dinas di Lembaga Sandi Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik ...

Salinan pedoman umum TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Peraturan Instansi Lain TAG PERATURAN . administrasi. ahli kepabeanan. ak-fita ... Organisasi dan Tata Laksana: Mulai Berlaku: 27-Aug-2010 s/d : Tentang: Pedomana Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan: Isi Singkat: bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus komunikasi serta informasi antarunit organisasi, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan ketentuan tata ...

TujuanPedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuanmenciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalampenyelenggaraan pemerintahan.C. SasaranSasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintahadalah:1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalampenyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh instansi pemerintah;2. terwujudnya keterpaduan ...

PERATURAN MENTERI DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

Dengan melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas, diharapkan tercipta tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas komunikasi tulis antar instansi pemerintah dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Jakarta, Mei 2011 Sekretaris Utama, DR. Sudibyo Alimoeso, MA - 1 - PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ...

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS - BSSN

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sedangkan administrasi tata persuratan, tata kearsipan, dan tata pelaporan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 ...

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut. www.djpp.depkumham.go.id. 9 2013, No.69 1. Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. 2. Pembakuan ...

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ...

pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia tahun 2012 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi ...

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN UMUM. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIS . DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH . Pendahuluan; Kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan modernisasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. ...

(PDF) PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH ...

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 ...

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH - 123dok

tata naskah dinas: Pedoman Tata Naskah Dinas

Tujuan disusunnya pedoman tata naskah dinas adalah untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan atau dengan instansi/pihak lain di luar Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Dasar Hukum tata naskah dinas di Kementerian Keuangan: 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 80 ...

TATA NASKAH DINAS - klcfiles.kemenkeu.go.id

tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor 72/M.PAN/07/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas menilai bahwa penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan instansi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Peraturan Menteri (Permen) Keputusan Menteri (Kepmen) ... Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2016 "Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat" Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2016 Tentang Pedoman TND ; Permen PU Nomor 06/PRT/M/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Dep.PU ...

Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH ...

Tujuan Pedoman Umum TNDE ini bertujuan untuk menciptakan acuan pembuatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis TNDE instansi pemerintah dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.C. Sasaran Sasaran TNDE adalah 1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan tata naskah dinas elektronik di seluruh instansi pemerintah; 2. terwujudnya ...

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIS DILINGKUNGAN ...

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS - BPKP

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B